

Demokrasi Patronase Dan Praktik Politik Uang : Pengalaman Pilkada Sumut Oleh Mahasiswa PPKN Unimed

Jekson Saragih, Putri Widia Ningsih, Muthiah Latifah, Esra Julita Br PA, Julia Ivana

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : jeksonsumbayak28@gmail.com

Abstract Indonesia, with its dynamic democratic process, is often characterized by patronage politics and money politics during the Regional Head General Election (PILKADA). This phenomenon has become an integral part of the political reality of this country. Patronage politics, which involves the use of power or position to influence political support, and political practices involving money that financially benefit interest groups, have a significant impact on the democratic process. This research aims to understand how democratic patronage and money political practices are carried out by candidates candidates based on regional election experience by UNIMED PPKn students. There are several strategies to overcome this problem, and implementing these strategies must involve cooperation between the government, supervisory institutions, civil society and the media in order to create a cleaner and more transparent political environment.

Keywords: Patronage Democracy, Money Politics, Regional Elections

Abstrak Indonesia, dengan proses demokrasi yang dinamis, seringkali diwarnai dengan politik patronase dan politik uang pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Fenomena ini telah menjadi bagian integral dari realitas politik negeri ini. Politik patronase, yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau posisi untuk mempengaruhi dukungan politik, dan praktik politik yang melibatkan uang yang secara finansial menguntungkan kelompok kepentingan, mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana demokrasi patronase dan praktik politik uang dilakukan oleh calon kandidat berdasarkan pengalaman pilkada oleh mahasiswa PPKn UNIMED. Terdapat beberapa strategi yang diperoleh dalam mengatasi masalah tersebut, dan dalam melakukan strategi tersebut harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan media demi menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan

Kata kunci : Demokrasi Patronase, Politik Uang, Pilkada

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan proses demokrasi yang dinamis, seringkali diwarnai dengan politik patronase dan politik uang pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Fenomena ini telah menjadi bagian integral dari realitas politik negeri ini. Politik patronase, yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau posisi untuk mempengaruhi dukungan politik, dan praktik politik yang melibatkan uang yang secara finansial menguntungkan kelompok kepentingan, mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi. Salah satu aspek yang mempersulit Pilkada adalah politik patronase, dimana pejabat atau calon pemimpin suatu daerah menggunakan kekuasaan atau sumber daya negara untuk mendapatkan dukungan. Hal ini dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk memanipulasi opini publik, penyalahgunaan dana publik untuk tujuan politik, dan janji dukungan yang tidak realistis. Tindakan-tindakan ini mengancam integritas proses demokrasi dan melemahkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam persaingan politik.

Received Oktober 27, 2023; Revised November 02, 2023; Accepted Desember 03, 2023

* Jekson Saragih, jeksonsumbayak28@gmail.com

Praktik politik uang juga menjadi persoalan serius dalam Pilkada. Praktik ini melibatkan pemberian uang, barang, atau imbalan lain kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan atau suara. Fenomena ini tidak hanya merusak hakikat demokrasi yang sehat, namun juga mereduksi nilai pemilu berdasarkan isi program dan visi misi calon utama presiden daerah. Praktik politik yang berkaitan dengan uang seringkali menimbulkan ketergantungan antara pemilih dan calon kepala daerah, serta korupsi dan manipulasi kemauan politik. Penting untuk mengkaji fenomena klientisme dan praktik politik uang yang meluas di Indonesia dalam konteks pembangunan demokrasi yang sehat. Hal ini penting tidak hanya untuk memahami dinamika politik lokal, namun juga untuk kualitas demokrasi secara keseluruhan. Pertama, kajian mendalam mengenai patronase dan praktik politik uang memungkinkan kita mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan yang menghambat proses demokrasi yang adil dan adil.

Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui dampak praktik-praktik tersebut terhadap proses politik, termasuk partisipasi politik dan integritas pemilu. Kedua, mengkaji politik patronase dan politik uang menawarkan peluang untuk mengembangkan solusi efektif untuk memerangi praktik-praktik yang melemahkan demokrasi. Analisis yang cermat dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan atau perubahan sistemik yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem politik. Ketiga, wawasan dari penelitian mengenai politik patronase dan praktik kebijakan moneter meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman terhadap proses demokrasi. Hal ini menginspirasi masyarakat sipil, aktivis dan elemen terkait lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih sehat, memperkuat pengawasan publik dan mendukung pemilu yang adil dan bebas dari manipulasi dan korupsi.

Dengan mengkaji fenomena politik patronase dan praktik politik uang secara komprehensif, kita dapat membuka jalan bagi reformasi politik yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis di Indonesia. Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang mengganggu integritas proses demokrasi. Fenomena ini melibatkan pembagian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan atau suaranya. Praktik ini tidak hanya melemahkan esensi pemilu yang berdasarkan pada isi visi, misi dan program kandidat, namun juga mempunyai konsekuensi serius terhadap keadilan persaingan politik. Selain itu, praktik politik uang menciptakan saling ketergantungan antara pemilih dan calon pemimpin daerah serta mengubah dinamika proses demokrasi ke arah transaksi keuangan dibandingkan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan politik dan kualitas kepemimpinan. Praktik

ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi calon independen atau mereka yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai, karena sulitnya bersaing secara setara dalam belanja kampanye. Selain itu, penerapan politik uang juga dapat meningkatkan korupsi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Pengalaman Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sangat penting untuk mengkaji dampak dan realitas yang dihadapi mahasiswa dalam konteks proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (PILKADA) kerap menjadi ajang berbagai praktik politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat, termasuk klientelisme dan politik moneter. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan dan pilar masa depan negara. memainkan peran penting dalam mengamati, memahami dan merespons praktik politik saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, adalah model penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan persepsi. Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada strategi apa yang lebih efektif diterapkan seorang guru pada saat pelaksanaan pembelajaran supaya siswa/i mudah memahami suatu materi. Hal ini berfungsi untuk mengetahui serta mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh, terdapat beberapa tanggapan daripada responden yang diantaranya, yaitu :

1. Nama : Lira

- Bagaimana pemahaman anda terkait politik patronase dan money politik? :

Patronase merujuk pada sistem di mana para pemimpin politik atau pejabat menggunakan kekuasaan atau pengaruh mereka untuk memberikan keuntungan atau bantuan kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas mereka. Sementara money politik berkaitan erat dengan penggunaan uang atau sumber daya finansial untuk mempengaruhi hasil politik.

- Apakah anda pernah menerima tindakan money politik dari calon kandidat saat melakukan pilkada? :

Saya pernah mendapatkan berupa sembako dari calon kandidat tersebut.

- Bagaimana tanggapan anda terkait calon kandidat yang melakukan kegiatan calon kandidat yang melakukan politik patronase dan monet politik? :

menurut saya jika masyarakat yang menerima transaksi politik patronase berbentuk sembako menganggap itu sebagai suatu kebutuhan dan wajar menerima, tetapi kembali lagi ke diri kita sendiri yang mana menurut kita pantas di pilih.

2. Nama : Putri

- Bagaimana pemahaman anda terkait politik patronase dan money politik? :

Politik patronase merujuk pada praktik di mana para pemimpin politik atau pemerintah menggunakan kekuasaan atau pengaruh mereka untuk memberikan keuntungan atau bantuan kepada individu atau kelompok 23 tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau kepentingan pribadi. Money politik merujuk pada penggunaan uang dalam proses politik

- Apakah anda pernah menerima tindakan money politik dari calon kandidat saat melakukan pilkada? :

Di gang saya itu mintak memangsangkan lampu jalan kepada calon kandidat tersebut karena di gang saya sedikit adanya lampu jalan.

- Bagaimana tanggapan anda terkait calon kandidat yang melakukan kegiatan calon kandidat yang melakukan politik patronase dan monet politik? :

Menurut saya kalau mereka mengasih uang atau sembako dan sebagainya itu balek ke diri masing-masing untuk memilih dia atau enggan yaa dan keperluan orang juga beda-beda.

3. Nama : Donacia Manturi

- Bagaimana pemahaman anda terkait politik patronase dan money politik? :

Politik patronase dan money politik adalah praktik yang merugikan demokrasi dan masyarakat. Menurut saya bentuk-bentuk politik uang atau money politics dalam pemilihan terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti pembagian uang, bantuan sembako, dan lain-lain. Praktik ini dapat menciptakan korupsi dan merugikan Masyarakat

- Apakah anda pernah menerima tindakan money politik dari calon kandidat saat melakukan pilkada? :

Saya pernah mendapatkan berupa uang dari calon kandidat tersebut

- Bagaimana tanggapan anda terkait calon kandidat yang melakukan kegiatan calon kandidat yang melakukan politik patronase dan monet politik? :

Menurut saya itu salah , tapi menurut saya cuman karna duit itu hancur kedepannya nah kenapa saya menerima uangnya itu karena mau siapapun yang menang sama aja kehidupan kita dari pada engga ada keuntungan sama sekali mending saya menerima uangnya.

4. Nama : Ezra Simanullang

- Bagaimana pemahaman anda terkait politik patronase dan money politik? :

Politik patronase dan money politik adalah politik uang dalam pemilihan terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti pembagian uang, bantuan sembako, dan lain-lain. Praktik ini dapat menciptakan korupsi dan merugikan Masyarakat

- Apakah anda pernah menerima tindakan money politik dari calon kandidat saat melakukan pilkada? :

Saya tidak menerima tapi keluarga saya yang menerima

- Bagaimana tanggapan anda terkait calon kandidat yang melakukan kegiatan calon kandidat yang melakukan politik patronase dan monet politik? :

Calon kandidat yang terlibat dalam politik patronase dan money politik dapat merusak demokrasi dan merugikan masyarakat. Praktik politik uang dalam pemilihan, seperti pembagian uang dan bantuan sembako, dapat menciptakan korupsi.

5. Nama : Jojo Mindo Manullang Jurusan :

- Bagaimana pemahaman anda terkait politik patronase dan money politik? :

Politik patronase dan money politik merupakan fenomena dalam dunia politik yang seringkali menciptakan ketidakseimbangan, ketidakadilan, serta masalah etika dan kebijakan.

- Apakah anda pernah menerima tindakan money politik dari calon kandidat saat melakukan pilkada? :

Saya pernah mendapatkan sembako dan sarung dari calon kadidat tersebut.

- Bagaimana tanggapan anda terkait calon kandidat yang melakukan kegiatan calon kandidat yang melakukan politik patronase dan monet politik? :

Menurut saya patronase dan politik uang hanya sedikit berpengaruh positif terhadap dukungan suara petahana, dan dalam beberapa kasus, ada model strategi elektoral yang mirip dengan politik uang yang malah menurunkan suara calon petahana.

6. Nama : Ture ayu Situmeang

- Bagaimana pemahaman anda terkait politik patronase dan money politik? :

politik patronase dan money politik merupakan praktik yang merugikan .money politik dan politik patronase ini menciptakan ketidak seimbangan hubungan antara rakyat dan penguasa

- Apakah anda pernah menerima tindakan money politik dari calon kandidat saat melakukan pilkada? :

Saya pernah mendapatkan berupa mukenah dari calok kandidat tersebut

- Bagaimana tanggapan anda terkait calon kandidat yang melakukan kegiatan calon kandidat yang melakukan politik patronase dan monet politik? :

menurut saya calon kandidat yang terlibat dalam politik patronase dan money politik salah karna itu tidak adil.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), demokrasi patronase dan politik uang dapat menjadi masalah serius. Berikut adalah beberapa pembahasan terkait dengan pengalaman pilkada dan dampak demokrasi patronase serta politik uang sebagai berikut :

- Pengaruh Kelompok Kepentingan: - Pilkada sering kali menjadi ajang di mana kelompok-kelompok kepentingan mencoba memperoleh pengaruh dengan memberikan dukungan finansial kepada calon tertentu. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tersebut ketika calon tersebut terpilih.
- Distribusi Sumber Daya: - Calon atau partai politik mungkin menggunakan praktik patronase untuk memastikan kemenangan mereka dengan mendistribusikan pekerjaan atau proyek pembangunan kepada pendukung setia. Hal ini bisa merugikan aspek meritokrasi dalam pembangunan daerah.
- Politisasi Program Pembangunan: - Adanya politik uang dapat mempolitisasi program pembangunan yang seharusnya dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Keputusan pembangunan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada kebutuhan nyata masyarakat.
- Ketidaksetaraan Akses Pendidikan Politik: - Praktik politik uang dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan politik. Calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar memiliki keunggulan untuk mencapai kemenangan
- Pentingnya Peran Media : - Media memiliki peran penting dalam membongkar praktik demokrasi patronase dan politik uang. Liputan media yang independen dapat mengungkapkan pelanggaran etika dan melibatkan masyarakat dalam pemahaman dampak negatifnya.

- Partisipasi Masyarakat: - Pilkada yang terbebani oleh demokrasi patronase dan politik uang dapat mengurangi partisipasi masyarakat yang merasa bahwa proses tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan kehendak rakyat.
- Pentingnya Reformasi Pemilihan: - Pengalaman pilkada yang tercemar oleh praktik-praktik negatif ini mendorong pentingnya reformasi dalam sistem pemilihan, termasuk peraturan pembiayaan kampanye yang lebih ketat dan peran lembaga pengawas yang kuat.

Penanganan demokrasi patronase dan politik uang memerlukan upaya komprehensif untuk memperkuat integritas demokrasi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan mencakup sebagai berikut :

- Transparansi dan Akuntabilitas: - Meningkatkan transparansi dalam pembiayaan kampanye politik. - Mewajibkan laporan keuangan partai politik dan kandidat secara terbuka.
- Reformasi Sistem Pembiayaan Kampanye: - Memperkenalkan sistem pembiayaan kampanye yang bersifat transparan dan terbatas. - Membatasi sumbangan individu dan entitas untuk mengurangi pengaruh kelompok kepentingan.
- Pendidikan Politik: - Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif demokrasi patronase dan politik uang. - Mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan berdasarkan kebijakan dan kinerja, bukan hadiah atau imbalan pribadi.
- Penguatan Institusi Pengawas: - Mempertahankan atau meningkatkan independensi lembaga-lembaga pengawas pemilihan. - Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum terkait kampanye politik.
- Partisipasi Masyarakat: - Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik untuk mengurangi ketergantungan pada dukungan patronase. - Mendorong pendekatan berbasis komunitas dalam pengambilan keputusan.
- Hukum Anti-Korupsi: - Meningkatkan ketatnya hukum anti-korupsi untuk menangani praktik politik uang. - Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran etika politik.
- Media Independen: - Mendukung keberagaman dan independensi media untuk memastikan informasi yang adil dan akurat. - Mendorong liputan media terhadap praktik demokrasi patronase dan politik uang. Penerapan strategi ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan media demi menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan

KESIMPULAN

Demokrasi patronase merujuk pada sistem politik di mana pemimpin atau partai politik menggunakan praktik-praktik patronase untuk mempertahankan atau memperoleh dukungan politik. Dalam konteks ini, "patronase" mengacu pada pemberian kebijakan, posisi, atau sumber daya oleh pemimpin atau partai kepada pendukungnya sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Praktik ini dapat mencakup pemberian pekerjaan, proyek pembangunan, atau manfaat lainnya kepada kelompok atau individu tertentu guna memperkuat basis politik mereka. Sementara demokrasi seharusnya mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan, demokrasi patronase sering kali melibatkan distribusi sumber daya berdasarkan hubungan personal dan politik, yang dapat mengancam integritas demokrasi.

Untuk mengatasi politik patronase atau politik transaksional di Indonesia, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah:

- Reformasi Sistem Politik: Menerapkan reformasi dalam sistem politik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini dapat melibatkan pembahasan regulasi yang mengatur pembiayaan politik, prosedur pemilihan umum, dan mekanisme akuntabilitas bagi pejabat publik.
- Penguatan Institusi Antikorupsi: Mendukung dan memperkuat lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga ini untuk menangani kasus-kasus politik transaksional dan korupsi.
- Peningkatan Kesadaran Publik: Melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik patronase dan transaksional. Masyarakat yang teredukasi lebih mungkin mengkritisi dan menolak praktik-praktik yang merugikan demokrasi.
- Penguatan Partai Politik: Mendorong partai politik untuk mengembangkan mekanisme internal yang memastikan seleksi calon pejabat berdasarkan kualifikasi, integritas, dan dedikasi terhadap pelayanan masyarakat, bukan hanya hubungan personal atau kontribusi finansial.
- Perbaikan Sistem Pembiayaan Politik: Menerapkan aturan yang ketat terkait dengan pembiayaan kampanye dan partai politik. Ini dapat mencakup pelaporan transparan sumber dan penggunaan dana politik, serta pembatasan sumbangan dari individu atau perusahaan.
- Peningkatan Pengawasan Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan politik. Melibatkan warga dalam pemantauan kebijakan publik dan memungkinkan adanya umpan balik yang efektif terhadap tindakan politik yang tidak etis.

- Pemberian Sanksi yang Tegas: Menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika politik dan hukum. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap praktik-praktik korupsi, nepotisme, atau politik transaksional

DAFTAR PUSTAKA

- W. Atlet and J. D. Widoyoko, "Politik, Patronase dan Pengadaan," vol. 4, pp. 1–23.
Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Muhfudz. 2018. 3 CV. Adanu Abimata PATRONASE POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Aspinall, Edward., and Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang Di Indonesia : Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014.*
- Boix, Carles dkk. 2018. *Perbandingan Politik*
- Erward Aspinal.2019. *Pemilu, Klientelisme, dan negara Indonesia*
- M. Mahsun, "Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan," *JPW (Jurnal Polit. Walisongo)*, vol. 2, no. 1, pp. 13–26, 2020, doi: 10.21580/jpw.2020.2.1.1996.
- I. Setiawan, Ibrahim, and Ranto, "PATRONASE DAN KLIENTALISME POLITIK (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019)," *BULLET J. Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 6, pp. 1255–1262, 2022.
- O. G. Madung, "Korupsi, Patronase, Dan Demokrasi," *J. Ledalero*, vol. 15, no. 1, p. 11, 2016, doi: 10.31385/jl.v15i1.26.11-23.
- A. Akbar *et al.*, "Perihal partisipasi masyarakat," *Ser. Eval. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masy.*, p. 5, 2019.
- N. K. Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 2, p. 329, 2020, doi: 10.38043/jids.v4i2.2496.
- M. R. Fatahilah, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Pilkada Jawa Timur 2018)," *Apl. Adm. Media Anal. Masal. Adm.*, vol. 22, no. 2, p. 11, 2022, doi: 10.30649/aamama.v22i2.127.
- L. Feri Amsari, SH., MH., *PENATAAN SISTEM PEMILU MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD PENGHORMATAN KEDAULATAN RAKYAT.* 2008.
- A. Lahagu and D. Hidayat, "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Kristen," *Kelola J. Manaj. Pendidik.*, vol. 10, no. 1, pp. 35–44, 2023, doi: 10.24246/j.jk.2023.v10.i1.p35-44.
- [Y. A. P. Putra, "Partisipasti Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru," *Jom FISIP*, vol. 4, no. 2, pp. 1–13, 2017, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/130369-ID-partisipasi-masyarakat-pada-pemilihan-um.pdf>
- A. Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019," *J. Ilm. Ilmu Adm.*

Negara, vol. 8, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available:
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4805>

K. P. Umum and P. S. Utara, *Mengapa Harus Memilih ?Partisipasi Masyarakat Sulut Saat
Pilkada di Tengah Pandemi.*